

PENCEGAHAN KORUPSI BUMN

J. Danang Widoyoko

Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia

PERSOALAN BUMN



- Kasus korupsi BUMN merugikan negara dan masyarakat langsung (Jiwasraya, ASABRI, Garuda dll)
- Ketidakjelasan tujuan: profit atau pelayanan publik?
- Seleksi tertutup dan intervensi politik
- Monopoli dan proteksi oleh negara
- Relasi yang dekat: bisnis-birokrasi-politisi dan problem konflik kepentingan.
- Jumlah BUMN sangat banyak, sulit melakukan koordinasi dan monitoring (FY 2021: 79 persero+12 Perum)

KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN



- Membentuk holding, mengurangi jumlah BUMN, memudahkan monitoring dan koordinasi.
- Restrukturisasi dan likuidasi BUMN.
- Mendorong penegakan hukum dalam kasus korupsi BUMN.
- Mendorong penerapan SMAP/ISO 37001 (Agustus 2021: 98 dari 107 tersertifikasi)

TRAC BUMN 2018

PROGRAM ANTIKORUPSI

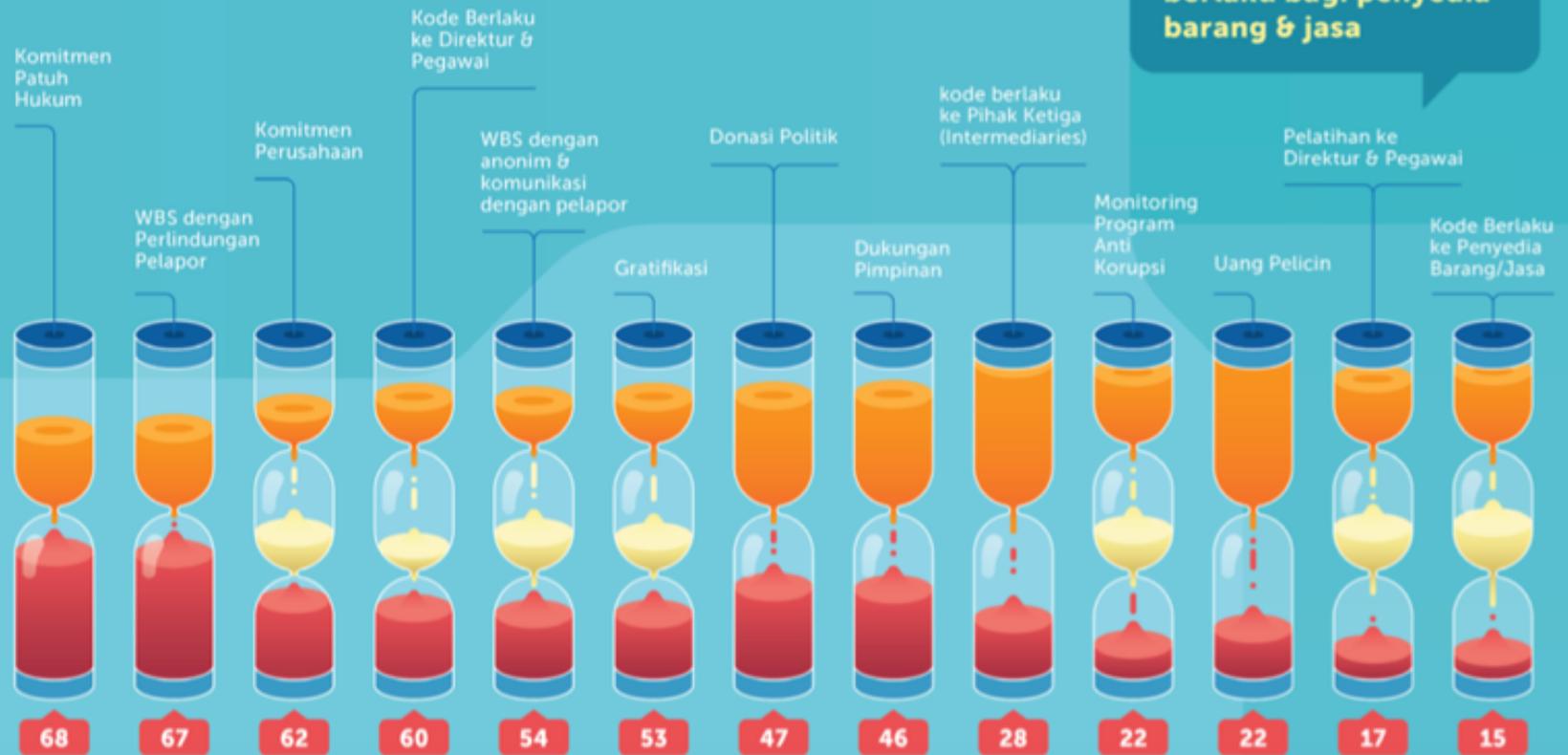
105 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

TERTINGGI

Komitmen Patuh terhadap Hukum

TERENDAH

Kode perilaku yang berlaku bagi penyedia barang & jasa



10 PRINSIP IDEAL BUMN



1. Beroperasi dengan standar etika dan integritas tertinggi
2. Memastikan tatakelola dan pengawasan praktek terbaik program anti-korupsi
3. Akuntabel terhadap pemangku kepentingan melalui transparansi dan pelaporan publik
4. Memastikan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia mendukung program anti- korupsi
5. Merancang program anti-korupsi berdasarkan penilaian risiko

10 PRINSIP IDEAL BUMN



6. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur khusus untuk menangkal risiko korupsi utama
7. Mengelola hubungan dengan pihak ketiga untuk memastikan mereka menjalankan usaha sesuai standar anti-korupsi yang setara dengan standar BUMN
8. Melakukan komunikasi dan pelatihan untuk membumikan program anti-korupsi
9. Memberikan advis yang aman dan mudah diakses dan saluran pelaporan indikasi pelanggaran (*whistleblowing*)
10. Memantau, menilai, dan terus meningkatkan pelaksanaan program antikorupsi



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

